

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS
UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

DISERTASI

**OLEH
FATHURRAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS
UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh:

**Fathurrahman
NIM. 180311020029**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrahman

NIM : 180311020029

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1973

Program Studi : S3 Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow and red revenue stamp. The stamp is a 'Meterai Tempel' (adhesive stamp) for 20,000 Rupiah, featuring the Garuda Pancasila emblem and the serial number 41EAMX150213658.

Fathurrahman

SERTIFIKAT PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	
1415/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat https://www.turnitin.com , dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:	
Nama	: Fathurrahman
NIM	: 180311020029
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul	: Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (11%) atau kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERBUKA .	
Banjarmasin, 16 Juli 2025	
	 
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd NIP. 197105251997031006	

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

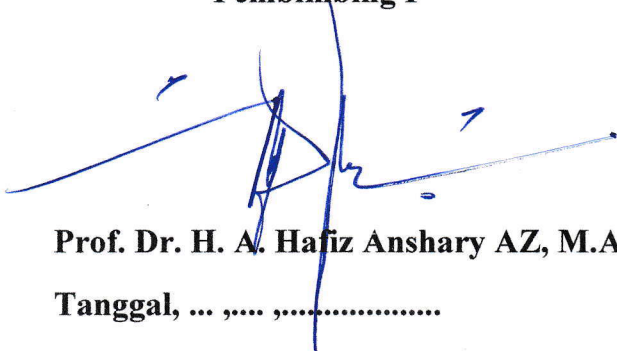
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama : Fathurrahman

NIM : 180311020029

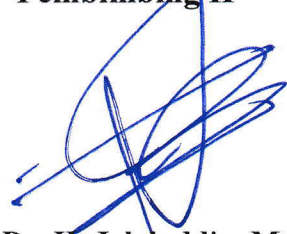
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A
Tanggal, ... , ,

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Tanggal, ... , ,

PENGESAHAN

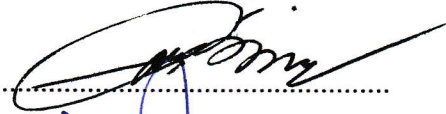
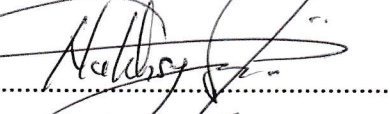
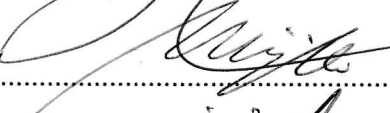
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Fathurrahman
NIM. 180311020029

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Rabu, 30 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. (Ketua Penguji)	
2 Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA. (Penguji Utama)	
3 Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji)	
4 Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., MH (Penguji Eksternal)	
5 Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc., MA (Penguji)	
6 Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Penguji)	
7 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk. (Penguji/Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. H. Zulfa Djamalie, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Fathurrahman, NIM. 180311020029, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., dan Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci: *putusan pengadilan, ujaran kebencian, hukum Islam, restoratif.*

Ujaran kebencian telah menjadi tantangan signifikan di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi norma hukum dan prinsip *equality before the law*. Fenomena ini, yang seringkali diperparah oleh penggunaan media sosial, tidak hanya merusak keharmonisan dan persatuan masyarakat yang beragam, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Putusan pengadilan dalam kasus ujaran kebencian menjadi krusial sebagai instrumen penegakan hukum dan pembentukan norma sosial, yang mencerminkan interaksi kompleks antara aspek sosiologis, antropologis, dan yuridis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum, khususnya dalam perspektif Islam, diterapkan dalam menangani kasus-kasus ini, serta bagaimana putusan tersebut berkontribusi pada pemulihan nilai-nilai toleransi dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis dan pemahaman hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi putusan pengadilan terkait kasus ujaran kebencian, seperti Perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel (Dhani Ahmad Prasetyo), Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI (Dhani Ahmad Prasetyo), Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor 11 PK/PID/2018 (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel (Muhammad Yahya Waloni), Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps (I Gede Aryastina alias Jerinx), Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb (Fery Syahputra alias Fery Kiting). Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori hukum dan analisis kasus, sementara bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum digunakan untuk informasi tambahan. Data dianalisis dengan membandingkan putusan pengadilan dengan literatur hukum dan ensiklopedia untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika ujaran kebencian di Indonesia sangat kompleks, melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan antropologis. Secara yuridis, tantangan muncul dari penafsiran dan penerapan pasal-pasal seperti UU ITE dan KUHP, serta pembuktian niat dan legal standing pelapor, seperti yang terlihat dalam kasus Ahmad Dhani, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jerinx, dan Fery Syahputra. Sosiologis, kasus-kasus ini menyoroti polarisasi masyarakat, peran media sosial dalam penyebaran informasi, dan dampak pada kohesi sosial serta kepercayaan terhadap institusi. Antropologis, problematika berkaitan dengan

interpretasi simbol, diksi, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi konflik. Dalam perspektif hukum Islam, ujaran kebencian dikategorikan sebagai *jarimah ta'ziriyah*, yang sanksinya ditentukan oleh *ulil amri* berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dengan tujuan pencegahan (*zajr*), perbaikan (*islah*), dan perlindungan masyarakat (*maqasid syariah*). Putusan pengadilan, meskipun tidak secara langsung mengadopsi *fiqh jinayah*, menunjukkan keselarasan filosofis dengan konsep *ta'zir* dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan hukum restoratif sangat penting untuk menangani ujaran kebencian secara lebih efektif, dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan pemulihan hubungan sosial.

ABSTRACT

Fathurrahman, Student ID. 180311020029, *Analysis of Court Decisions on Hate Speech Cases in Indonesia from an Islamic Law Perspective and Positive Law*, Supervisor I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., and Supervisor II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Doctoral Program in Sharia Studies, Postgraduate Program at Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2024.

Keywords: *court ruling, hate speech, Islamic law, restorative.*

Hate speech has become a significant challenge in Indonesia, a country that upholds the rule of law and the principle of equality before the law. This phenomenon, often exacerbated by the use of social media, not only undermines the harmony and unity of a diverse society but also generates social tensions and conflicts. Court rulings in hate speech cases are crucial as instruments of law enforcement and the establishment of social norms, reflecting the complex interaction between sociological, anthropological, and legal aspects. Therefore, it is important to analyze how the law, particularly from an Islamic perspective, is applied in addressing these cases, as well as how these rulings contribute to the restoration of tolerance values and the development of an inclusive society.

This research employs a normative legal approach, which focuses on the analysis and understanding of law based on applicable norms, both written and unwritten. The primary legal materials used include court rulings related to hate speech cases, such as Case Number 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel (Dhani Ahmad Prasetyo), Number 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI (Dhani Ahmad Prasetyo), Number 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number 117/PID/2017/PT.DKI.JKT (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number 11 PK/PID/2018 (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number 1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel (Muhammad Yahya Waloni), Number 828/Pid.Sus/2020/PN Dps (I Gede Aryastina alias Jerinx), Number 866/Pid.Sus/2020/PN Stb (Fery Syahputra alias Fery Kiting). Secondary legal materials include legal literature such as books, articles, and journals that discuss legal theories and case analyses, while tertiary legal materials in the form of legal encyclopedias are used for additional information. The data is analyzed by comparing court rulings with legal literature and encyclopedias to achieve a comprehensive understanding.

The research findings indicate that the issue of hate speech in Indonesia is highly complex, involving legal, sociological, and anthropological aspects. Legally, challenges arise from the interpretation and application of articles such as the ITE Law and the Criminal Code, as well as the proof of intent and legal standing of the complainant, as seen in the cases of Ahmad Dhani, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jerinx, and Fery Syahputra. Sociologically, these cases highlight the polarization of society, the role of social media in the dissemination of information, and the impact on social cohesion and trust in institutions. Anthropologically, the issues relate to the interpretation of symbols, diction, and cultural values that

influence conflicts. From an Islamic legal perspective, hate speech is categorized as *jarimah ta'ziriyah*, with sanctions determined by *ulil amri* based on public interest (*maslahah 'ammah*), aimed at prevention (*zajr*), reform (*islah*), and community protection (*maqasid syariah*). Court rulings, although not directly adopting *fiqh jinayah*, demonstrate a philosophical alignment with the concept of *ta'zir* in maintaining justice, legal certainty, and social benefit. Therefore, the development of restorative legal policies is essential for addressing hate speech more effectively, emphasizing dialogue, tolerance, and the restoration of social relationships.

الملخص

فتح الرحمن، رقم الطالب ١٨٠٣١١٠٢٠٠٢٩، تحليل قرارات المحكمة في قضايا خطاب الكراهية في إندونيسيا من منظر القانون الإسلامي، المشرف الأول: البروفيسور الدكتور حفيظ أنشاري AZ، ماجستير، والمشرف الثاني: البروفيسور الدكتور جلال الدين، ماجستير في العلوم الإنسانية، برنامج الدكتوراه في الدراسات الشرعية، الدراسات العليا في جامعة أنطاساري الإسلامية الحكومية في بانجارماسين، ٢٠٢٤.

الكلمات الرئيسية: حكم المحكمة، خطاب الكراهية، القانون الإسلامي، الإصلاح

لقد أصبح خطاب الكراهية تحديًا كبيرًا في إندونيسيا، وهي دولة ترفع من شأن القوانين والمبادئ المتعلقة بالمساواة أمام القانون. هذه الظاهرة، التي غالبًا ما تتفاقم بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لا تضر فقط بالانسجام والوحدة بين المجتمع المتنوع، بل تثير أيضًا التوترات الاجتماعية والصراعات. إن حكم المحكمة في قضايا خطاب الكراهية يصبح أمرًا حاسمًا كأداة لتطبيق القانون وتشكيل المعايير الاجتماعية، مما يعكس التفاعل المعقد بين الجوانب السوسولوجية والأنثروبولوجية والقانونية. لذلك، من المهم تحليل كيفية تطبيق القانون، وخاصة من منظور إسلامي، في معالجة هذه القضايا، وكيف تساهم الأحكام في استعادة قيم التسامح وبناء مجتمع شامل.

يستخدم هذا البحث النهج القانوني الوضعي، الذي يركز على تحليل وفهم القانون بناءً على المعايير السائدة، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. تشمل المصادر القانونية الأولية المستخدمة أحكام المحاكم المتعلقة بقضايا خطاب الكراهية، مثل القضية رقم Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel/٣٧٠ (دهاني أحمد براسيتيو)، رقم Pid.Sus/2019/PT.DKI/٥٨ (دهاني أحمد براسيتيو)، رقم Pid.B/2016/PN.Jkt Utr/١٥٣٧ (المهندس باسوكي تشاهاجا بورناما المعروف بـ "أهوك")، رقم PID/2017/PT.DKI.JKT/١١٧ (المهندس باسوكي تشاهاجا بورناما المعروف بـ "أهوك")، رقم PK/PID/2018 ١١ (المهندس باسوكي تشاهاجا بورناما المعروف بـ "أهوك")، رقم Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel/١٠٠٣ (محمد يحيى والوني)، رقم Pid.Sus/2020/PN Dps/٨٢٨ (إي جيدي أرياستينا المعروف بـ "جيرينكس")، رقم

٨٦٦/Pid.Sus/2020/PN Stb/ (فيري سياهبوترا المعروف بـ"فيري كيتينغ"). تشمل المصادر القانونية الثانوية الأدبيات القانونية مثل الكتب والمقالات والمجلات التي تناقش النظريات القانونية وتحليل القضايا، بينما تستخدم المصادر القانونية الثالثة في شكل موسوعات قانونية للحصول على معلومات إضافية. يتم تحليل البيانات من خلال مقارنة أحكام المحاكم مع الأدبيات القانونية والموسوعات للحصول على فهم شامل.

تظهر نتائج البحث أن مشكلة خطاب الكراهية في إندونيسيا معقدة للغاية، حيث تشمل الجوانب القانونية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية. من الناحية القانونية، تظهر التحديات من تفسير وتطبيق المواد مثل قانون المعلومات والتكنولوجيا وقانون العقوبات، بالإضافة إلى إثبات النية والموقف القانوني للمدعي، كما يتضح في قضايا أحمد داني، وباسuki اتجهاجا بورناما (أهوك)، وجيرينكس، وفيري سياهبوترا. من الناحية السوسيولوجية، تسلط هذه القضايا الضوء على استقطاب المجتمع، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات، وتأثيرها على التماسك الاجتماعي والثقة في المؤسسات. من الناحية الأنثروبولوجية، تتعلق المشكلة بتفسير الرموز، والعبارات، والقيم الثقافية التي تؤثر على الصراعات. من منظور القانون الإسلامي، يتم تصنيف خطاب الكراهية كجريمة تعزيرية، حيث تحدد عقوبتها من قبل ولي الأمر بناءً على المصلحة العامة (المصلحة المرسلّة)، بهدف الوقاية (زجر)، والإصلاح (إصلاح)، وحماية المجتمع (مقاصد الشريعة). على الرغم من أن حكم المحكمة لا يتبنى مباشرة فقه الجنايات، إلا أنه يظهر توافقاً فلسفياً مع مفهوم التعزير في الحفاظ على العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة الاجتماعية. لذلك، فإن تطوير سياسة قانونية إصلاحية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع خطاب الكراهية بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على الحوار، والتسامح، واستعادة العلاقات الاجتماعية.

MOTTO

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi orang lain.*

*Kejayaan manusia hanya dalam amal agama yang
sempurna.*

KATA PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Mertua, saudara, dan keluarga. Rasa hormat dan kata terimakasih yang sangat dalam saya ucapkan atas semua pengorbanan, do'a, dukungan dan motivasi yang tidak terhingga dari kalian sehingga memberikan semangat kepada saya dalam menempuh pendidikan Doktoral dan menyelesaikan Disertasi ini.

Untuk istriku tercinta Nurul Hikmah, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita suami mu ini, makasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini.

Para guru-guru dan dosen-dosen, terimakasih banyak atas ilmu yang diberikan, kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik saya. Semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Teman-teman seperjuangan di prodi Ilmu Syariah angkatan 2018 yang sangat banyak membantu dalam perkuliahan, berbagi suka dan duka, canda dan tawa menjadi momen yang akan selalu saya ingat.

Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terimakasih dan do'a yang dapat saya persembahkan, semoga Allah SWT. selalu memberi perlindungan-Nya kepada kita semua Amin Ya Rabbal 'Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Transliterasi Arab-Latin:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	A	-
2.	ب	ba	B	-
3.	ت	ta	T	-
4.	ث	tsa	Ts	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha	<u>H</u>	-
7.	خ	kha	Kh	-
8.	د	dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dz	-
10.	ر	ra	R	-
11.	ز	zay	Z	-
12.	س	sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	shad	Sh	-
15.	ض	dhad	Dh	-
16.	ط	tha	Th	-
17.	ظ	zha	Zh	-
18.	ع	‘ain	‘	-

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
19.	غ	ghain	Gh	-
20.	ف	fa	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	ه	ha	H	-
27.	و	waw	W	-
28.	ي	ya	Y	-
29.	ء	hamzah	‘	Tidak digunakan untuk hamzah di awal kata

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena *tasydîd*, di tulis rangkap, seperti وهاً بي di tulis *wahhâbî*.

C. Vokal Panjang

1. Bunyi a panjang ditulis â, seperti مسلمان ditulis muslimâni.
2. Bunyi i panjang ditulis î, seperti muslimîn.
3. Bunyi u panjang ditulis û, seperti muslimûn.

D. Kata Sandang Alif dan Lam

Kalau Alif dan Lam, baik yang bersambung dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiah*, ditulis *al*, seperti:

1. المنار (untuk huruf *qamariyah*) ditulis *al-Manâr*.
2. الروضة (untuk huruf *syamsiah*) ditulis *al-Raudhah*.

E. Penulisan Kata-Kata dalam Kalimat

Cara yang dipakai didasarkan pada penulisan kata demi kata, seperti:

الدلالة العقلية في القرآن ditulis *al-Dilâlât al-'Aqliyyah fi al-Qurân*.

F. Penulisan *Ta Marbûthah* di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, surat. Misalnya, *ta marbûthah* yang terdapat pada kata بدعة ditulis *bid'ah*.
2. Apabila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain ditulis *t*. Misalnya, *ta marbûthah* pada kata مطبعة المنار ditulis *mathba'at al-manâr*.

G. Pengecualian

1. Nama orang, nama tempat, dan nama-nama lain yang sudah dipakai di Indonesia, ditulis dengan huruf ejaan dalam bahasa Indonesia, seperti: Sirajuddin dan Beirut.
2. Huruf hamzah yang terdapat tanda (‘), seperti ابن تيمية, ابو زهرة, اسوة ditulis Abû Zahrah, Ibn Taimiyah dan uswah.
3. Kata القرآن yang terdapat pada teks Arab, seperti اسماء القرآن ditulis asmâ dengan huruf kapital al-Qurân.

II. Daftar Singkatan:

Ar.	:Arab	tahq.	: <i>tahqîq</i>
As.	: <i>'alaihi al-salâm</i>	tp.	: data nama penerbit tidak ada.
cet.	: cetakan	t.tp	: data nama tempat penerbit tidak ada.
ed.	: Editor	t. t.	: data tahun penerbitan tidak ada.
h.	: halaman	Td	: sama sekali tidak ada data.
H.	: Tahun Hijriyah	Saw	: <i>Shallâ Allâhu 'alaihi wa sallama</i>
HR.	: Hadis Riwayat	Swt	: <i>Subhânahû wa ta'âlâ</i>
J.	: Juz/Jilid	w.	: Wafat
M.	: Tahun Masehi	terj.	: Terjemahan
QS.	: Al-Quran Surah	Vol.	: Volume
Ra.	: <i>Radhiya Allâhu 'anh</i>		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puja terhatur ke hadirat Allah Swt Maha Dzat yang tak terumuskan oleh kata yang luput dari genggaman makna, hanya karena rahmat dan karuniaNya disertasi yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Selesainya tulisan disertasi ini tentu saja banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan berbagai fasilitas sehingga terselenggara pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari khususnya di program S.3 UIN Antasari.
2. Prof. Dr. H. Zulfa Djamalie, S.Ag, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana dan Dr. Mujiburohman, M.A., Ph.D serta Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., MA sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi S.3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pascasarjana, mulai dari penerimaan mahasiswa, perkuliahan, sampai pada penulisan disertasi ini. Berbagai layanan telah diberikan, sehingga sangat menunjang penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A, selaku pembimbing I dan Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan

petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.

4. Seluruh Dosen S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan perkuliahan sehingga menambah ilmu dan wawasan, baik yang berhubungan dengan ilmu keagamaan dan ilmu tentang metode penelitian.
5. Kepada pihak Yayasan Haji Maming 69 yang telah memberikan beasiswa mahasiswa Program S.3 Pascasarjana UIN Antasari sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian penulisan ini.
6. Kepada semua pihak yang terlibat seperti rekan-rekan sesama mahasiswa Program S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan masukan-masukan yang menunjang penulisan ini.
7. Kepada Isteri yang tercinta Nurul Hikmah KA, SE yang selalu mendoakan dan memberi semangat, anak tercinta Muhammad Rizza Rahman dan Nabila Dwi Rianti yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati serta menemani saya dari awal kuliah dan menjelang akhir selesainya saya mengikuti pendidikan S3 ini. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	xii
KATA PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	29
D. Signifikansi Penelitian	30
E. Definisi Operasional.....	31
F. Penelitian Terdahulu	35
G. Kerangka Teori	41
H. Metode Penelitian.....	97
I. Sistematika Penulisan	100

BAB II BENTUK-BENTUK, DAMPAK, DASAR HUKUM PEMIDANAAN UJARAN KEBENCIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

A. Bentuk-bentuk ujaran kebencian.....	102
B. Dampak ujaran kebencian	113
C. Dasar hukum pemidanaan perkara ujaran kebencian di Indonesia	119
D. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.....	130

BAB III PROBLEMATIKA YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS DALAM PENANGANAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN

A. Problematika perkara Dhani Ahmad Prasetyo	141
B. Problematika perkara Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)	147
C. Problematika perkara I Gede Aryastina (Jerinx)	152
D. Problematika perkara Yahya Waloni	159
E. Problematika perkara Fery Syahputra (Fery Kiting).....	164
F. Problematika yuridis perkara ujaran kebencian menurut ahli	170
G. Problematika sosiologis perkara ujaran kebencian menurut ahli	175
H. Problematika antropologis perkara ujaran kebencian menurut ahli	179

**BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM SERTA
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIF**

- A. Pertimbangan hakim dalam putusan sidang perkara ujaran kebencian....183
- B. Analisis perkara perspektif hukum Islam.....252
- C. Analisis perkara perspektif hukum positif297
- D. Kebijakan hukum restoratif dan alternatif solusi perkara303

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan366
- B. Saran.....370

DAFTAR PUSTAKA.....373

LAMPIRAN.....380

DAFTAR RIWAYAT HIDUP